



The Asia Foundation



**Komisi Pemilihan Umum dan Penyediaan Informasi: Studi Banding Mengenai
Praktek Global yang Lebih Baik**

September 2012

Ucapan Terima Kasih

Laporan ini disusun oleh Pusat Hukum dan Demokrasi (*Centre for Law and Democracy-CLD*), bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF). Ini adalah bagian dari Australia Indonesia Electoral Support Program, yang dikelola oleh TAF dan sepenuhnya didanai oleh Australian Aid. Terima kasih kepada Vasu Mohan, International Foundation for Electoral System, dan Phil Diak, Australian Electoral Commission, atas masukannya untuk laporan ini.

Pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam publikasi ini belum tentu merupakan pandangan dari Pemerintah Australia atau AusAID.

© CLD, Halifax and TAF, San Francisco

ISBN - 978-0-9878751-4-3

Kontak:

Centre for Law and Democracy

39 Chartwell Lane

Halifax, N.S., B3M3S7

Canada

Tel: +1 902 431---3688

Email: info@law-democracy.org

www.law-democracy.org

The Asia Foundation

Jl. Adityawarman no. 40

Kebayoran Baru, Jakarta 12160

Indonesia

Tel: +62 21 727 88424

www.asiafoundation.org

Lisensi karya ini berada di bawah lisensi Creative Commons Attribution-Noncommercial-ShareAlike 3.0 Unported.

Anda diperbolehkan untuk menyalin, mendistribusikan dan menampilkan karya ini dan membuat karya saduran, selama Anda:

1. Memberi kredit kepada Centre for Law and Democracy, The Asia Foundation dan AusAID.
2. Tidak menggunakan karya ini untuk tujuan komersial.
3. Mendistribusikan karya yang merupakan saduran dari publikasi ini dengan menggunakan lisensi yang identik .

Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0>

Pendahuluan

Pada tanggal 15 Oktober 1995, Irak menggelar pemilihan umum (pemilu) presiden di mana Saddam Hussein, diktator brutal dan otoriter negara tersebut, terpilih kembali dengan perolehan 99,96% suara. Partisipasi pemilih dilaporkan sebanyak 99,47%. Dia bukan orang lalim pertama yang menggunakan strategi ini. Sejak jaman dahulu para diktator, mulai dari Julius Caesar hingga Kim Jong-Il dan Muammar Gaddafi, telah menggunakan pemilu tidak sah atau pemilu yang dimanipulasi sebagai strategi untuk menciptakan landasan legitimasi kekuasaan mereka. Seperti yang digambarkan oleh contoh-contoh tadi, karena tingkat kepentingannya, pemilu merupakan magnet yang menarik dan memicu proses manipulasi, dan penyelenggaraan Pemilu tidak langsung menjadikan sebuah negara menjadi negara berdemokrasi.

Dalam rangka memenuhi hak untuk berpartisipasi dalam politik, seperti yang tercantum dalam hukum internasional, warga negara harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu yang "murni".¹ Ketika sebuah pemilu bersifat "murni", pemilu tersebut sering digambarkan oleh media dan pengamat pemilu sebagai pemilu yang "bebas dan adil", suatu standar yang gagal dipenuhi oleh pemilu Saddam Hussein. Namun, agar sebuah pemilu mampu mencapai tujuannya - yang secara umum berupa pemindahan kekuasaan politik dari satu kumpulan wakil yang terpilih kepada kumpulan wakil terpilih yang lain - tidaklah cukup untuk melaksanakan sebuah pemilu yang bersifat bebas dan adil; pemilu tersebut juga harus diakui dan diterima, terutama oleh para pemilih, sebagai pemilu yang bebas dan adil.

Sangatlah penting bahwa rakyat secara keseluruhan, dan terutama mereka yang mendukung pihak yang kalah, memahami dan menerima hasil pemilu, dan fakta bahwa mandat pemilu telah diberikan kepada pemenang (dan tidak diberikan kepada yang kalah). Jika ada yang tidak menerima hasil pemilu, ada potensi terjadinya kerusuhan dan kekerasan. Kekacauan yang terjadi setelah pemilu Kenya tahun 2007, di mana 1.500 orang tewas dan sampai dengan 600.000 orang menjadi pengungsi, adalah contoh betapa buruknya akibat yang bisa terjadi ketika hasil sebuah pemilu ditolak dan dianggap tidak

¹ Lihat, misalnya, Pasal 25 dari *Kovenans Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik*.

sah oleh sebagian besar rakyat.²

Pada akhirnya, tujuan yang ingin dicapai adalah kepercayaan terhadap hasil pemilu tapi ini menuntut adanya kepercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Ini sangat mempengaruhi kesuksesan pemilu. Misalnya, sejak awal, seorang individu harus memiliki kepercayaan bahwa suara yang diberikannya tidaklah sia-sia (yakni bahwa suara mereka akan dihitung dan membawa dampak). Dalam beberapa kasus, dan terutama dalam pemilu yang baru pertama kali diselenggarakan, banyak orang tidak memiliki rasa percaya diri yang cukup untuk pergi ke tempat pemungutan suara dan memberikan suara mereka, karena bagi mereka proses tersebut merupakan sebuah proses yang cukup menakutkan dan juga memakan waktu.

Sebaiknya proses penyelenggaraan pemilu sesungguhnya dan persepsi publik mengenai proses tersebut dibedakan, tapi seraya mengakui bahwa keduanya memang berkaitan erat. Walaupun penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil merupakan hal yang sangat penting, pada kenyataannya persepsi juga amat penting dalam menjaga kredibilitas dan stabilitas sebuah sistem demokrasi. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap proses pemilu aktual yang bersifat bebas dan adil dan adanya persepsi serupa dari masyarakat. Untuk maksud laporan ini, cukup untuk dicatat bahwa pemberian informasi kepada pemilih penting bagi kedua hal tersebut. Di hampir semua demokrasi yang sudah maju maupun masih berkembang, pentingnya transparansi dalam proses pemilu sudah dipahami secara implisit.

Ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah disadari. Jika banyak, atau bahkan beberapa, pemilih tidak memiliki informasi mengenai cara mendaftar dan memberikan suara, mereka tidak akan bisa berpartisipasi dalam pemilu, dan ini bisa mengurangi keabsahan pemilu tersebut. Jika pemilih tidak tahu mengenai partai dan kandidat serta proposal dan landasan mereka, para pemilih tidak akan bisa memberikan suara mereka secara efektif, dan hasilnya tidak akan mewakili kehendak bebas para pemberi suara. Jika mereka tidak mengetahui cara kerja pemilu, tidak mengetahui tingkat pemerintahan apa yang akan menerima suara mereka dan tidak mengetahui apa tugas tingkat pemerintahan tersebut,

² “Deal to end Kenyan crisis agreed”, BBC News, 12 April 2008. Dapat dilihat di: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7344816.stm>.

dan pentingnya suara mereka sendiri dalam proses ini, kemungkinan para pemilih bersedia memberikan suara akan semakin kecil dan kemungkinan pemilu dapat mewakili kehendak bebas para pemilih juga akan semakin kecil.

Keyakinan terhadap pemilu sangat bergantung pada kepercayaan para pemilih terhadap badan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pemilu (disini disebut komisi pemilu).³ Jika ada kesan bahwa badan tersebut tidak kompeten, tidak netral secara politik, tidak memiliki sumber daya yang cukup, korup, tidak mampu melawan aktor-aktor kuat yang berusaha untuk mengagalkan pemilu, atau tidak dapat menjalankan pemilu dengan cara yang menjamin bahwa pemilu tersebut bebas dan adil maka hal ini akan secara signifikan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemilu dan hasilnya.

Keyakinan seperti ini sangat bergantung, pada kemampuan komisi pemilu untuk dapat beroperasi secara transparan. Kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan, mengakibatkan, atau berkontribusi terhadap kegagalan untuk menyelesaikan masalah-masalah sesungguhnya dalam pengelolaan pemilu. Seperti yang dikatakan oleh Hakim Agung Amerika Serikat yang terkenal, Louis Brandeis: "Sedikit sinar matahari adalah disinfektan terbaik."⁴ Dan hal ini juga dapat mengarah pada kurangnya kepercayaan terhadap cara komisi mengelola pemilu, sekalipun misalnya pada kenyataannya komisi tersebut bekerja dengan sangat baik.

Menjamin aliran informasi yang bebas terkait pemilu melibatkan banyak aktor dan banyak sistem informasi yang berbeda. Para partai sendiri, didorong oleh kepentingan pribadi mereka untuk memenangkan pemilu, merupakan bagian penting dari sistem penyebaran informasi yang lebih luas. Media juga merupakan pemain utama, yang berfungsi sebagai sumber informasi utama mengenai pemilu bagi banyak penduduk. Organisasi masyarakat sipil juga seringkali memainkan peranan penting, misalnya dengan memberikan program pendidikan pemilih, memantau beberapa proses pemilu dan menyebarluaskan hasilnya, serta menyediakan analisis alternatif dan perspektif mengenai

3 Setiap wilayah hukum menggunakan nama-nama yang berbeda untuk merujuk badan-badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pemilu, dan jenis-jenis badan yang berbeda melakukan fungsi ini di berbagai negara. Laporan ini menggunakan istilah 'komisi pemilihan umum' sebagai singkatan untuk merujuk semua badan-badan tersebut.

4 *Other People's Money, and How the Bankers Use It* (New York: Frederick A. Stokes Company, 1914). p. 92.

pemilu. Kemunculan Internet secara signifikan telah memperbanyak jumlah pemain dan cara mereka menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pemilu, mulai dari blogger perorangan, forum diskusi hingga *user generated content spaces* yang diselenggarakan oleh media yang lebih tradisional.

Komisi pemilu juga memainkan peranan yang sangat penting dalam proses ini. Di beberapa bidang yang sangat penting - seperti informasi mengenai partai dan kandidat yang bertarung dalam pemilu dan hasilnya - bidang-bidang ini mewakili satu-satunya sumber informasi otoritas resmi. Di bidang lain - seperti pendidikan pemilih - bidang-bidang ini bekerja secara berdampingan, dan seringkali bekerja sama dengan, pemain lain untuk menjamin adanya arus informasi yang tepat. Selain memberikan pengungkapan informasi secara proaktif, sebagai badan publik, komisi pemilu merupakan pelaksana pemenuhan kebutuhan hak atas informasi (atau kebebasan informasi) dan, dengan demikian, terikat untuk menyediakan akses ke semua informasi yang mereka pegang, meski ada beberapa pengecualian mengenai hal ini.

Meskipun komisi pemilu memainkan peranan penting, saat ini tidak ada standar dasar yang ditetapkan, atau bahkan kajian yang dapat dengan jelas mengidentifikasi praktek-praktek yang lebih baik, terkait penyebaran informasi oleh badan-badan ini. Laporan ini melakukan survei pada beberapa pendekatan yang berbeda oleh komisi pemilu dalam merilis informasi di berbagai negara dan wilayah di dunia, mengidentifikasi praktek-praktek yang lebih baik serta pendekatan-pendekatan yang harus dihindari. Berdasarkan praktek-praktek tersebut, dan juga hukum internasional, laporan ini menjelaskan kerangka standar kinerja yang lebih baik untuk komisi pemilu. Dengan demikian, laporan ini bertujuan untuk memberikan sumber daya bagi para komisi di negara demokrasi maju dan berkembang, memberikan dasar sehingga mereka dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pendekatan penyebaran informasi mereka saat ini, dan memberikan ide-ide bagi perbaikan. Standar-standar ini akan sangat penting bagi komisi pemilu di negara demokrasi yang sedang berkembang, yang tidak semata-mata bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan di dalam sistem, tetapi juga memainkan peranan utama dalam membangun demokrasi yang belum ada atau belum berakar dengan baik, dan menargetkan bagian masyarakat yang memiliki kecurigaan mendarah daging terhadap lembaga publik dan proses politik.

Komisi pemilu di seluruh dunia menggunakan banyak sistem untuk menyebarkan informasi, termasuk berbagai jenis media (cetak, radio dan televisi), kontak langsung dengan para pemilih dan sistem lain (seperti papan reklame, brosur dan pesan SMS). Akan tetapi, di banyak negara, internet menjadi sistem yang semakin penting dalam penyebaran informasi. Ini tentu saja berlaku untuk semua orang, dan semua badan publik, tetapi dapat disimpulkan bahwa, di seluruh dunia, komisi pemilu cenderung memiliki beberapa situs yang paling mudah diakses, komprehensif dan rinci jika dibandingkan dengan lembaga publik lainnya. Memang, banyak komisi pemilu telah mengambil langkah-langkah penting untuk mengubah situs mereka menjadi pusat informasi yang menyediakan akses kepada informasi mengenai nyaris semua aspek pemilu. Oleh karena itu laporan ini menitikberatkan fokusnya pada penggunaan internet oleh komisi pemilu, beberapa alasan fokus laporan ini antara lain adalah karena di banyak negara, internet merupakan sesuatu yang relatif baru, kajian dan standar penggunaan internet oleh komisi pemilu masih kurang, selain itu ruang lingkup, konten dan pengelolaan situs komisi pemilu sangatlah beragam.

1. Latar Belakang

1.1 Standar Internasional yang Relevan

Hak untuk berpartisipasi dalam politik sudah merupakan bagian dari hukum internasional. Hak ini dilindungi oleh Pasal 21 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Rights –UDHR*),⁵ yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak untuk memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik di negaranya.
3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini akan diterapkan dalam pemilu berkala dan murni yang dilakukan secara universal dan setara serta dilakukan melalui pemungutan suara rahasia atau dengan prosedur pemungutan suara bebas yang setara.

Standar yang sama tercermin dalam Pasal 25 dari Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*),⁶ perjanjian yang mengikat secara hukum terhadap 167 Partai Negara,⁷ sebagai berikut:

Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan, tanpa pembedaan yang disebutkan dalam pasal 2 dan pembatasan yang tidak masuk akal:

- (a) Untuk turut serta dalam pelaksanaan urusan publik, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- (b) Untuk memberikan suara dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, yang dilakukan secara universal dan setara serta dilakukan melalui pemungutan suara rahasia, untuk menjamin kebebasan dalam mengekspresikan kehendak para pemilih;

5 UN General Assembly Resolution 217A(III), 10 Desember 1948. Sebagai UN General Assembly Resolution, UDHR tidak mengikat secara formal. Namun, beberapa ketentuannya, dan boleh dibilang Pasal 21, dianggap mengikat secara hukum sebagai hukum kebiasaan internasional.

6 UN General Assembly Resolution 2200A(XXI), diadopsi pada tanggal 16 Desember 1966, mulai diterapkan sejak 23 Maret 1976.

7 Sejak September 2012

(c) Untuk dapat mengakses, secara setara, layanan masyarakat, di negaranya.

Jaminan serupa juga ada pada Pasal 23 dari Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika (*American Convention on Human Rights-ACHR*),⁸ Pasal 13 dari Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat (*African Charter on Human and Peoples' Rights-ACHPR*),⁹ dan Pasal 3 dari Protokol 1 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (*European Convention on Human Rights-ECHR*).¹⁰ Meskipun kalimat dalam pasal-pasal tersebut berbeda-beda, semuanya menekankan bahwa pemilu harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga suara pemilih merepresentasikan ekspresi bebas dari kehendak para pemilih.¹¹

Pentingnya transparansi dalam proses pemilu sudah diakui dalam banyak dokumen internasional. Pada tahun 2001, sebuah Resolusi Majelis Umum PBB tentang *Mendorong dan Memperkuat Demokrasi* mengundang negara anggota untuk:

[Memastikan] melalui undang-undang, lembaga dan mekanisme, kebebasan untuk membentuk partai-partai politik demokratis yang dapat berpartisipasi dalam pemilu, serta transparansi dan keadilan proses pemilu...¹²

Di Afrika, kebutuhan akan transparansi dalam pemilu berada pada tingkat yang sama dengan kebutuhan akan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil. Pasal 3 Piagam Afrika mengenai Demokrasi, Pemilihan Umum dan Pemerintahan, instrumen yang mengikat secara hukum, menetapkan prinsip-prinsip utama yang mengatur pemilu, dan Pasal 3 (4) mengacu pada:

Penyelenggaraan pemilu reguler yang transparan, bebas dan adil ...¹³

Dalam Pasal 17, negara-negara menegaskan kembali komitmen mereka untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan.

8 Diadopsi di San José, Kosta Rika, 22 November 1969, O.A.S Treaty Series No. 36, diterapkan pada tanggal 18 Juli 1978.

9 Diadopsi pada tanggal 27 Juni 1981, 21 I.L.M. 58 (1982), diterapkan pada tanggal 21 Oktober 1986.

10 Diadopsi pada tanggal 4 November 1950, E.T.S. No. 5, mulai diterapkan pada tanggal 3 September 1953. Protokol diadopsi pada tanggal 20 Maret 1952, E.T.S. No. 9, diterapkan pada tanggal 18 Mei 1954.

11 Akan tetapi, harus dicatat bahwa ini kurang eksplisit di dalam Piagam Afrika.

12 UN General Assembly Resolution 55/96, 28 Februari 2001, Pasal. 1 (d) (iv). Tersedia di: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/565/15/PDF/N0056515.pdf?OpenElement>.

13 Diadopsi oleh Eighth Ordinary Session of the Assembly of the African Union, Addis Ababa, Ethiopia, 30 Januari 2007, mulai berlaku sejak 15 Februari 2012.

Demikian pula, Deklarasi Kriteria Pemilu yang Bebas dan Adil, yang diadopsi oleh *Inter-Parliamentary Council*, badan pengatur *Inter-Parliamentary Union*, yang menyatukan berbagai parlemen dari seluruh dunia, menyimpulkan bahwa: "Negara harus melakukan semua tindakan yang diperlukan dan tepat untuk menjamin transparansi proses pemilu secara keseluruhan".¹⁴ Dan *Commission on European Union Election Assistance and Observation* mencatat bahwa:

Dalam kasus pemilu, tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mengacu pada kerangka legislatif dan peraturan yang tepat, serta administrasi pemilu yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan - meliputi pengawasan dan pemantauan independen - yang menjamin adanya rasa hormat terhadap aturan hukum. Orang-orang yang memiliki informasi, yang memegang bagian dalam proses pemilu, merupakan faktor utama dalam konteks ini.¹⁵

Hak untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh badan- badan publik, atau hak atas informasi, yang telah diakui di bawah hukum internasional sebagai bagian dari hak kebebasan berekspresi, juga relevan dengan penyebaran informasi oleh komisi pemilu. Pasal 19 dari UDHR menyatakan:

Setiap orang berhak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup hak untuk mempertahankan pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media tanpa adanya pembatasan.

Hak kebebasan berekspresi dijamin dengan istilah yang sangat mirip dalam Pasal 19 dari ICCPR.

Meskipun konsep hak atas informasi, seperti yang dipahami saat ini, belum diakui saat UDHR dan ICCPR diadopsi, perkembangan selanjutnya mengarah pada pengakuan hak ini seperti yang tercakup dalam aturan jaminan internasional atas hak kebebasan berekspresi, dan terutama hak untuk 'mencari' dan 'menerima' informasi serta gagasan-gagasan.

14 Diadopsi pada sesi ke-154, Paris, 26 Maret 1994. Diproduksi ulang dalam Michael D. Boda, ed, *Revisiting Free and Fair Elections: An international round table on election standards organized by the Inter-Parliamentary Union*, (Geneva: Inter-parliamentary Union, November 2004), p. 109. Tersedia di: http://www.ipu.org/PDF/publications/ffelections_en.pdf.

15 Communication from the Commission on EU election assistance and observation, COM/2000/0191 final. Tersedia di: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0191:EN:HTML>.

Sejak tahun 1999 tiga (dan kemudian empat) mandat internasional khusus mengenai kebebasan berekspresi - *United Nations (UN) Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression*, *Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of the Media*, *the Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression* dan *African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information* - telah mengadopsi deklarasi tahunan bersama mengenai berbagai masalah kebebasan berekspresi.

Deklarasi Bersama mereka pada tahun 2004 meliputi fokus yang signifikan pada hak atas informasi, dan menyatakan bahwa:

Hak untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh pejabat publik merupakan hak asasi manusia dasar yang harus diberlakukan pada tingkat nasional melalui legislasi yang komprehensif (misalnya UU Kebebasan Informasi) berdasarkan prinsip keterbukaan maksimum, membangun anggapan bahwa semua informasi dapat diakses dan hanya tunduk pada sejumlah kecil sistem pengecualian.¹⁶

Di waktu yang sama, deklarasi mengenai kebebasan berekspresi atau khususnya deklarasi mengenai hak atas informasi diadopsi oleh ketiga sistem regional untuk perlindungan hak asasi manusia di Amerika, Afrika dan Eropa.¹⁷

Kemudian muncul pengakuan formal terhadap hak atas informasi oleh pengadilan internasional. Pengadilan pertama yang melakukannya adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (*Inter-American Court of Human Rights*), dalam kasus *Claude Reyes dan Lainnya v. Chile* di tahun 2006.¹⁸ Dalam kasus ini, pengadilan secara eksplisit menyatakan bahwa hak kebebasan berekspresi ditetapkan dalam Pasal 13 dari ACHR, termasuk hak atas informasi. Dalam menjabarkan lingkup dan sifat hak tersebut,

16 Diadopsi pada tanggal 6 Desember 2004. Tersedia di: <http://www.unhcr.ch/hurricane/hurricane.nsf/0/9A56F80984C8BD5EC1256F6B005C47F0?opendocument>.

17 Lihat *Inter-American Declaration of Principles on Freedom of Expression*, 108th Regular Session, 19 Oktober 2000, ayat 4; *the Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa*, 32nd Ordinary Session, 17-23 Oktober 2002, Banjul, The Gambia, Principle IV; dan Recommendation No. R(2002)2 oleh Committee of Ministers of the Council of Europe mengenai akses terhadap dokumen-dokumen resmi, 21 Februari 2002, yang didedikasikan sepenuhnya untuk masalah ini meskipun lebih fokus pada isi dari hak atas informasi dari pada secara khusus mengakuinya sebagai hak asasi manusia
18 19 September 2006, Series C, No. 151.

pengadilan menyatakan bahwa:

Sehubungan dengan fakta-fakta kasus ini, pengadilan menilai bahwa Pasal 13 dari Konvensi, tentang menjamin secara tegas hak untuk "mencari" dan "menerima" "informasi", melindungi hak setiap orang untuk meminta akses terhadap informasi yang berada di bawah kontrol negara, dengan pengecualian yang ada dalam rangkaian pembatasan dalam Konvensi. Selanjutnya, pasal tersebut meliputi hak para individu untuk menerima informasi tersebut dan kewajiban positif negara untuk menyediakannya....¹⁹

Dibutuhkan waktu beberapa tahun tetapi, pada bulan April 2009, Pengadilan HAM Eropa mengikutinya, mengakui bahwa hak atas informasi hanya berdasarkan pada Pasal 10 dari ECHR, yang menjamin hak atas kebebasan berekspresi.²⁰

Komite HAM PBB, badan yang bertugas mendorong pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam ICCPR, relatif terlambat mengakui secara jelas hak atas informasi. Akan tetapi, Komentar Umum baru terhadap Pasal 19 ICCPR, yang diadopsi pada bulan September 2011, melaksanakan hal ini, dengan menyatakan bahwa:

Pasal 19, ayat 2 mencakup hak atas akses terhadap informasi yang dimiliki oleh badan-badan publik.²¹

1.2 Komisi Pemilu

Dalam prakteknya, cara negara-negara menerapkan hak untuk berpartisipasi dan menjalankan pemilu sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lain, dan sangat kontekstual. Tidak ada cara yang "benar" untuk menjalankan demokrasi. Hal ini berlaku, pada awalnya, terhadap sifat dari sistem politik itu sendiri. Hak untuk berpartisipasi dalam politik dapat dipenuhi sepenuhnya melalui legislatif *bicameral* atau *unicameral*, penggunaan inisiatif demokrasi langsung, republik presidensial atau sejumlah sistem lainnya.

Pendekatan yang sangat berbeda juga diambil terkait komposisi dan struktur komisi pemilu, dan juga tidak ada model tunggal bagi badan-badan yang dapat memastikan

19 Para. 77.

20 *Társaság A Szabadságjogokért v. Hungary*, 14 April 2009, Application No. 37374/05.

21 General Comment No. 34, 12 September 2011, CCPR/C/GC/34, para. 18.

bahwa proses pemilu berjalan dengan efektif. Walaupun berbeda, tujuan umum dan tujuan komisi pemilu, yaitu pengawasan proses yang independen, adil serta transparan yang memungkinkan kebebasan untuk mengekspresikan kehendak pemilih, berarti bahwa pengidentifikasian standar universal yang dapat diterapkan dan yang berkaitan dengan badan ini dapat dilakukan.

Pertama-tama, komisi pemilu harus independen dari partai yang sedang memegang kuasa, dan juga dari partai politik lain serta kepentingan pribadi lainnya. Satu contoh kuat dari badan struktural independen muncul di Kosta Rika. Pemilu Kosta Rika diselenggarakan oleh badan independen, Supreme Electoral Tribunal (TSE), yang didirikan oleh konstitusi.²² Anggota-anggota TSE dilantik saat memperoleh dua-pertiga dari total suara anggota Mahkamah Agung, dan hanya individu yang memiliki pengalaman hukum profesional setidaknya sepuluh tahun yang memenuhi syarat untuk posisi ini. Mahkamah Agung dapat memecat anggota TSE karena melakukan kesalahan jika mendapatkan dua pertiga suara anggota mereka, tapi TSE tidak berada di bawah Mahkamah Agung secara formal. Tidak ada banding yang diajukan terhadap keputusan atau resolusi TSE, dan TSE harus diajak berkonsultasi mengenai perubahan apapun dalam undang-undang pemilu. Jika TSE menolak perubahan yang diusulkan, perubahan tersebut hanya dapat diadopsi jika disetujui oleh dua pertiga suara mayoritas legislatif. Independensi TSE secara signifikan ditingkatkan oleh fakta bahwa mereka memegang kendali langsung atas Penjaga Sipil (semacam polisi) selama tiga bulan dari periode kampanye resmi.²³

Pada saat yang bersamaan, kemerdekaan adalah pertimbangan kontekstual. Demokrasi yang lebih tua dan lebih maju sering mengandalkan pemikiran implisit mengenai kemerdekaan (misalnya konvensi konstitusional) daripada struktur hukum formal. Misalnya, Otoritas Pemilu Swedia (EMB) berada di dalam cabang eksekutif, dan melapor kepada Kementrian Kehakiman (*Ministry of Justice*).²⁴ Meskipun EMB tidak berada di bawah pengawasan langsung Kementrian Kehakiman, hubungan ini kurang memiliki perlindungan struktural untuk menjamin kemerdekaan. Meskipun demikian, sistem

22 Diadopsi pada tanggal 7 November 1949, Pasal 99-104. Versi terjemahan dapat dilihat di: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9161>.

23 Lihat http://www.idea.int/publications/emd/upload/EMD_CS_Costa_Rica.pdf.

24 Dapat dilihat di: [http://www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-UD\(2005\)007-e.pdf](http://www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-UD(2005)007-e.pdf).

pemilu Swedia tetap bebas dan adil, terutama karena sejarah panjang demokrasi negara tersebut, yang memungkinkan Swedia untuk mengandalkan konvensi yang sudah ada, dan juga karena manajemen pemilu pada tingkat praktis sangat terdesentralisasi, yang dilakukan di tingkat kotamadya atau kabupaten oleh dewan pemilu lokal yang berfungsi secara otonom dari EMB pusat. Sistem Swedia adalah gambaran yang menarik mengenai negara-negara yang tradisi demokrasinya tertanam dalam pada masyarakatnya, sehingga seringkali masyarakat dapat berfungsi tanpa perlindungan formal yang sangat penting keberadaannya bagi sebuah demokrasi yang sedang berkembang.²⁵

Harus dilakukan pengamatan cermat untuk memastikan bahwa suatu independensi bersifat nyata, dan bukan independensi semu. Undang-undang secara resmi menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Nasional Kamboja (NEC) bersifat independen. Para anggota dicalonkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diangkat dengan Surat Keputusan Kerajaan, atas permintaan Dewan Menteri dan setelah disetujui oleh mayoritas absolut anggota Majelis Nasional. Walaupun proses ini sepertinya telah melibatkan sejumlah pemain yang berbeda, tapi pada kenyataannya saat salah satu pihak membentuk mayoritas dalam pemerintahan, partai tersebut otomatis mengendalikan proses.²⁶

Komisi pemilu juga harus memiliki sumber daya yang memadai. Pada tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Zimbabwe mengumumkan bahwa mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tahun yang akan datang.²⁷ Pengumuman ini muncul di tengah proses negosiasi antara faksi-faksi politik mengenai jadwal pemilu di masa depan. Meskipun pernyataan bahwa perlu dilakukannya suatu pemilu langsung, pernyataan ini diajukan oleh faksi Robert Mugabe, menimbulkan banyak keraguan, karena keputusan-keputusan ini seharusnya berdasarkan pada konstitusi dan hukum, dan bukan berdasarkan berapa banyak dana tersedia bagi komisi

25 Lihat http://www.idea.int/publications/emd/upload/EMD_CS_Sweden.pdf.

26 Ini sudah dikritik, misalnya, oleh Pusat Hak Asasi Manusia Kamboja. Lihat [http://www.sithi.org/admin/upload/media/%5B2012-05-31%5DThe%20National%20Election%20Committee%20the%20NEC/2012_05_31_CCHR_The%20National%20Election%20Committee_\(ENG\).pdf](http://www.sithi.org/admin/upload/media/%5B2012-05-31%5DThe%20National%20Election%20Committee%20the%20NEC/2012_05_31_CCHR_The%20National%20Election%20Committee_(ENG).pdf). Pelaksanaan pemilu tahun 2008 dikritik oleh para pengamat karena alasan ini, termasuk oleh Uni Eropa. Lihat: <http://www.electionguide.org/country-news.php?ID=37>.

27 Columbus S. Mavhunga, "In Zimbabwe, not enough money for elections", CNN, 17 Juli 2011. Dapat dilihat di: http://articles.cnn.com/2011-07-17/world/zimbabwe.election_1_mugabe-new-constitution-electoral-commission?_s=PM:WORLD.

pemilu.

Sumber daya yang memadai juga berkolerasi terhadap tersedianya dana untuk mendapatkan keahlian yang tepat. Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil adalah tugas yang kompleks dan rumit, dan komisi pemilu yang kuat harus memiliki stabilitas yang memadai dan birokrasi yang mendalam, termasuk untuk memastikan bahwa pengalaman dan keahlian diteruskan dari satu pemilu ke pemilu selanjutnya. Oleh karena itu, komisi pemilu sebaiknya berupa lembaga permanen, dan bukan komite *ad hoc* yang baru dibentuk saat dibutuhkan.²⁸ Misalnya, model Jordania saat ini, dimana sebuah komite baru ditunjuk untuk setiap pemilu, tidak memungkinkan adanya pengembangan kapasitas kelembagaan yang layak.²⁹ Pengakuan mengenai kebutuhannya stabilitas semakin diterima, dan dalam beberapa tahun terakhir terlihat pergerakan di beberapa negara, termasuk Jordania, yang beralih dari komisi pemilihan umum sementara menuju model-model permanen.

Studi terkemuka oleh *Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)*, *International Standards and Commitments on the Right to Democratic Elections: A Practical Guide to Democratic Elections Best Practice*, menegaskan kembali gagasan ini:

Negara atau komisi pemilu pusat haruslah sebuah badan yang berfungsi secara aktif dan bukan untuk jangka waktu yang terbatas sebelum pemilu. Berarti komisi pemilu pusat harus senantiasa bekerja untuk mengembangkan daftar pemilih dan mengambil tindakan-tindakan lainnya yang memperbaiki proses pemilu.³⁰

Seperti yang dijelaskan oleh kutipan ini, kebutuhan akan sebuah badan permanen bukan hanya untuk memastikan adanya penyerapan keahlian dan pengalaman, tetapi juga untuk memastikan tersedianya layanan terkait pemilu yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Seperti yang disebutkan di atas, amatlah penting bahwa komisi pemilu beroperasi dengan

28 Hal ini juga umumnya membantu meningkatkan independensi mereka.

29 Lihat: http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=11&year=2012 (dalam bahasa Arab).

30 OSCE, *International Standards and Commitments on the Right to Democratic Elections: A Practical Guide to Democratic Elections Best Practice* (Warsaw: 20 November 2002), p. 21. Dapat dilihat di: <http://www.osce.org/odihr/elections/16859>.

terbuka dan transparan. Penelitian OSCE mengidentifikasi praktek-praktek terbaik berikut untuk transparansi komisi pemilu:

- Badan Administrasi Pemilu harus memberikan informasi yang tepat waktu kepada publik, mengenai kandidat dan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu,.
- Badan Administrasi Pemilu harus memberikan informasi kepada publik, mengenai cara pemungutan suara dan informasi yang relevan bagi seorang pemilih mengenai cara pengisian surat suara yang sah, dengan tepat waktu
- Badan Administrasi Pemilu harus memberikan informasi yang tepat waktu kepada masyarakat, mengenai prosedur-prosedur untuk melindungi hak-hak pemilu.
- Informasi publik harus disediakan dalam bahasa kaum minoritas nasional di wilayah-wilayah geografis dimana kaum minoritas tersebut berada dan melalui media yang diyakini dapat menjangkau kaum minoritas tersebut.³¹

Keempat prinsip ini menunjukkan peran komisi pemilu yang lebih luas daripada hanya sekedar mengawasi tantangan-tantangan teknis yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebagai titik kontak resmi utama untuk publik, komisi pemilu menanggung tanggung jawab dasar untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan terhadap proses demokrasi. Komisi pemilu harus memainkan peranan yang aktif dan mendorong untuk bisa mencapai hal-hal berikut: mendidik para pemilih potensial mengenai hak, tanggung jawab serta pilihan mereka, dan memberikan informasi mengenai latar belakang pemilu dan apa artinya.

Gagasan komisi pemilu sebagai organ bagi penyebaran informasi relevan yang berkelanjutan sejalan dengan laporan akhir Kolokium mengenai Pemilu di Afrika, yang memberikan rekomendasi serupa untuk badan pengawas pemilu:

1. Alokasikan waktu dan sumber daya yang tepat bagi aspek-aspek penting proses pemilu seperti perencanaan pemilu, perencanaan anggaran, pemilihan staf dan pengembangan kapasitas, proses pendaftaran pemilih, proses seleksi kandidat, manajemen data, rekrutmen dan pelatihan agen pemungutan suara, pendidikan

³¹ *Ibid.*, p. 32.

pemilih dan kewarganegaraan serta mekanisme-mekanisme kepatuhan.

...

3. Jalankan operasi secara transparan.

...

6. Pastikan bahwa informasi akurat mengenai proses-proses pemilu diberikan secara teratur kepada masyarakat dengan tepat waktu.

7. Pastikan aksesibilitas proses pemilu untuk kelompok-kelompok marjinal, termasuk para penyandang cacat, pemuda dan wanita.

...

9. Hitung hasil pemilu dengan secepatnya dan transparan, tabulasi dan umumkan.³²

Oleh sebab itu harus dipahami bahwa komisi pemilu sebagai memiliki peran dalam pendorong, selain pengawasan. Dengan kata lain, komisi pemilu harus mempertimbangkan hal ini sebagai bagian dari mandat mereka untuk mendidik dan membebaskan pemilih, untuk memastikan bahwa mereka memahami hak-hak mereka di bawah sistem demokrasi dan, sebisa mungkin, memotivasi para pemilih tentang pentingnya penggunaan hak pilih.

2. Standar Penyebaran Informasi

2.1 Memastikan bahwa Para Pemilih dapat Berpartisipasi

Salah satu fungsi terpenting komisi pemilu adalah menyediakan informasi praktis bagi pemilih tentang cara berpartisipasi dalam proses pemungutan suara, termasuk informasi mengenai cara dan waktu mendaftar, serta cara untuk memberikan suara. Informasi mengenai cara mendaftar untuk pemilu amatlah penting terutama dalam penyelenggaraan pemilu pertama kali, begitu pula dengan informasi tentang cara memberikan suara. Jika dibandingkan dengan bidang-bidang lain, dalam bidang ini komisi pemilu perlu

32 *Colloquium on African Elections: Best Practices and Cross-Sectoral Collaboration, Final Report* (Accra, Ghana: 2009), p. 21, dapat dilihat di: http://www.ndi.org/files/African_Elections_Best_Practices_ENG.pdf.

menjangkau melampaui distribusi formulir elektronik untuk memastikan bahwa mereka menjangkau masyarakat yang membutuhkan informasi ini. Ini sangat penting terutama untuk menjangkau kaum minoritas dan kelompok yang rentan untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang secara struktural dilarang berpartisipasi dalam pemilu. Jika tidak, keadilan pemilu dapat rusak, dan masyarakat tertentu mungkin akan gagal untuk mendapatkan perwakilan pemilu yang layak mereka peroleh. Di masa mendatang hal ini dapat menyebabkan komunitas-komunitas ini mencari cara-cara lain, yang kurang demokratis, untuk menyelesaikan masalah pengucilan dan diskriminasi.

Pengalaman menunjukkan bahwa cara paling efektif untuk memastikan bahwa para pemilih memahami prosedur pendaftaran yang terkadang agak rumit, termasuk dokumen yang harus mereka bawa dan dokumen alternatif yang dapat digunakan, adalah dengan mengajarkannya melalui sesi tatap muka, yang bisa dilakukan melalui pelatihan resmi, pertemuan masyarakat atau membangun sistem lokal dimana orang-orang bertemu.³³ Pada saat yang sama, ini bisa sangat memakan waktu dan memerlukan banyak sumber daya manusia. Penjangkauan media dan penggunaan materi-materi promosi seperti brosur, papan reklame, *factsheet* dan bahkan SMS adalah pendekatan yang dapat digunakan. Di banyak negara, kegiatan-kegiatan ini melibatkan kerjasama antara komisi pemilu dan kelompok masyarakat sipil, dengan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki masing-masing kelompok. Pelatihan ekstensif dalam program untuk melatih menghasilkan kontak langsung dengan banyak pemilih dalam pemilu-pemilu awal di Afghanistan,³⁴ sementara Filipina juga memiliki program-program penjangkauan yang efektif dan inovatif.³⁵

Sesi penjangkauan dan program yang sama juga dapat digunakan untuk memenuhi peran yang lebih luas yakni sebagai pendorong dan pendidik. Kunjungan ke situs resmi pemilu Maroko diawali dengan pesan yang memberitahu para pengguna bahwa pemungutan

33 Misalnya melalui tempat pertemuan agama.

34 Lihat, misalnya, laporan oleh *International Foundation for Electoral Systems* (IFES) mengenai kegiatannya di Afghanistan pada pemilu tahun 2004 dan 2005, dapat dilihat di: <http://www.ifes.org/Content/Projects/Europe-Asia/.Afghanistan/2004-Presiden-dan-2005-Parlemen-Pemilihan.aspx>, dan laporan serupa oleh UNDP, dapat dilihat di: http://www.undp.org.af/Publications/KeyDocuments/factsheets/dcse/dcse_factsheet_05_04_06.pdf

35 Misalnya, informasi mengenai Pillar3, pendidikan pemilih, pada situs komisi pemilu: <http://www.comelec.gov.ph/?r=AboutUs/COMSTRAT1116/pillars/Pillar3>.

suara adalah tugas patriotik setiap warga negara.³⁶

Termasuk juga menyediakan informasi teknis, seperti tanggal pemilu. Situs untuk *Federal Returning Officer* Jerman memberikan perkiraan tanggal untuk setiap pemilu mulai saat ini hingga tahun 2016,³⁷ sementara Pusat Komisi Informasi Lithuania menyediakan tanggal pemilu sampai tahun 2020.³⁸ Setidaknya, komisi pemilu harus mencantumkan tanggal pemilu selanjutnya pada setiap tingkatan yang menjadi tanggung jawab mereka (kota, nasional dan sebagainya). Situs komisi pemilu Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyanggah logo yang menonjol di sudut kanan atas yang berisi pengumuman mengenai pemilu selanjutnya, yang akan berlangsung pada tahun 2014.³⁹

Di negara-negara yang tidak memiliki tanggal penyelenggaraan pemilu yang pasti, seperti Australia dan Irlandia, komisi pemilu harus mencantumkan tanggal-tanggal yang relevan mengenai pemilu berikutnya (seperti tanggal dimana mandat dari pemerintah saat ini akan berakhir). Mencantumkan pemilu yang akan datang dalam konteks yang tepat juga bisa menjadi hal yang penting. Sebagai contoh, situs *High National Election Commission* milik Libya tidak mencantumkan tanggal-tanggal untuk pemilu yang akan datang mulai Agustus 2012 karena, pada saat itu, pemerintah transisi negara itu baru saja terpilih dan jadwal pemilu selanjutnya tidak jelas.⁴⁰ Akan tetapi, situs tersebut mencantumkan informasi mengenai penempatan pemilu terakhir ke dalam jadwal transisi (pemilu, penyusunan konstitusi, referendum konstitusi, dan sebagainya).

Informasi yang disediakan dalam kategori ini juga harus mencakup beberapa situasi berbeda yang mungkin dihadapi oleh para pemilih. Ini mungkin meliputi, misalnya, informasi mengenai cara mengalihkan dan memberikan suara bagi para pemilih yang berhalangan atau cara warga negara yang bertempat tinggal di luar negara tersebut dapat memberikan suara. Situs Komisi Pemilu Filipina (COMELEC) telah mendedikasikan

36 Tersedia di: <http://www.listeselectorales.ma/> (dalam bahasa Arab).

37 Tersedia di: http://www.bundeswahlleiter.de/en/kuenftige_wahlen/.

38 Tersedia di: <http://www.vrk.lt/en/pirmas-puslapis/preliminary-elections-dates/preliminary-elections-dates.html>.

39 Lihat <http://www.kpu.go.id>.

40 Tersedia di: <http://www.hnec.ly> (dalam bahasa Arab).

informasi mengenai pendaftaran sektor-sektor yang rentan, termasuk para penyandang cacat, penduduk pribumi dan tahanan.⁴¹ Ini juga berguna bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk memastikan adanya penjangkauan yang efektif terhadap kelompok-kelompok ini.⁴²

Di beberapa negara, portal-portal resmi yang berisi informasi pemilu menawarkan informasi yang sangat rinci mengenai sektor ini. Terutama, portal informasi Yunani (dijalankan melalui situs Kementerian Dalam Negeri) meliputi petunjuk-petunjuk khusus untuk hakim, PNS dan ulama, wakil pengadilan dan anggota dewan yang berpartisipasi kembali dalam pemilu, wakil pengadilan yang melaksanakan tugasnya di tempat pemungutan suara (TPS) khusus bagi orang-orang yang terdaftar di satu tempat dan penduduk di tempat yang lain, penjaga pemilu, tentara, polisi, petugas penjaga pantai dan petugas pemadam kebakaran, pelaut dan para pemilih di luar konstituen.⁴³ Walaupun kategorisasi ini jelas mencakup banyak lapisan masyarakat, kategorisasi ini juga menunjukkan bahwa aturan-aturan mengenai cara dan tempat pemungutan suara bisa disederhanakan.

Di negara-negara yang telah mengadopsi atau sedang dalam proses mengadopsi protokol *e-voting* (pemungutan suara elektronik), ada dorongan yang amat besar bagi komisi pemilu untuk mengubah situs mereka menjadi pusat informasi menyeluruh. Ini bukan saja karena penerapan *e-voting* secara drastis memperluas pentingnya kehadiran online komisi pemilu dalam proses pemilu, tetapi juga untuk meredakan skeptisisme alami pemilih mengenai keamanan dan integritas pemungutan suara elektronik. Meskipun *e-voting* memperoleh kredibilitas di seluruh dunia, dan para pendukungnya menyatakan bahwa ini sama amannya dengan surat suara tradisional, seiring pengenalan teknologi baru ke bagian aktivitas sosial yang sangat penting, wajar jika masyarakat merasa khawatir. Oleh karena itu, dibutuhkan transparansi yang lebih besar untuk dapat meredakan ketakutan-ketakutan ini. Contoh yang baik mengenai hal ini dapat ditemukan di website Kementerian Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah Norwegia, Proyek E-Vote 2011 negara ini tampaknya dirancang khususnya untuk menghadapi segala

41 Tersedia di: <http://www.comelec.gov.ph/?r=VoterRegistration/VulnerableSectorsRegistration>.

42 Lihat, misalnya: <http://www.ifes.org/Content/Publications/News-in-Brief/2012/April/Partnerships-Increase-Access-to-Information-in-the-Philippines.aspx>.

43 Dapat dilihat di: <http://www.ypes.gr/en/Elections/NationalElections/DeputyElections/InterestCitizen/>.

kekhawatiran yang mungkin ada mengenai integritas prosesnya.⁴⁴ Selain semua informasi praktis yang diperlukan mengenai cara memberikan suara secara online, situs ini menyediakan informasi teknis yang mendalam, termasuk arsitektur dan bahkan kode sumber program *e-voting*. Langkah penting lainnya adalah keputusan untuk menayangkan dekripsi dan penghitungan suara di situs, video-video yang tetap tersedia di situs. Situs ini juga berisi laporan-laporan yang mengevaluasi keberhasilan percontohan, termasuk oleh para pengamat OSCE.

Selain teknis pemungutan suara, penting bagi para pemilih untuk memahami arti suara yang mereka berikan. Oleh sebab itu, komisi pemilu harus menyediakan informasi bagi pemilih mengenai keseluruhan cara kerja demokrasi mereka, dan konteks khusus pemilu selanjutnya dalam proses pemilu dan demokrasi yang lebih luas. Ini harus meliputi informasi mengenai kekuasaan yang akan dipegang oleh badan yang diberikan suara. Juga penting bagi para pemilih untuk memahami karakteristik sistemik yang lebih luas dari sistem pemungutan suara, agar mereka sungguh-sungguh memahami dan menyesuaikan diri dengan konteks, ekspresi demokrasi dan bagaimana suara mereka akan berpengaruh. Ini harus mencakup informasi tentang apakah kursi diberikan berdasarkan perwakilan proporsional atau melalui sistem jajak pendapat calon tertinggi (*first-past-the-post system*), dan rincian-rincian lain yang relevan.

Selain informasi bagi pemilih, komisi pemilu harus menyebarkan informasi yang relevan kepada aktor-aktor lain dalam proses politik, termasuk partai dan kandidat politik, donor kampanye potensial dan aktivis pihak ketiga.

Untuk partai politik dan kandidat, ini harus mencakup informasi praktis tentang cara mendaftar, serta aturan mengenai masalah-masalah seperti pengeluaran kampanye, pengungkapan, kampanye dan akses kandidat ke ruang publik dan sumber daya publik, serta aturan lain tentang berkampanye.

Untuk donor-donor potensial bagi badan-badan publik, informasi yang relevan harus meliputi aturan mengenai penggalangan dana dan pengeluaran kampanye, untuk

44 Dapat dilihat di: <http://www.regjeringen.no/en/dep/krd/prosjekter/e-vote-2011-project.html?id=597658>.

memberikan rasa holistik mengenai penggunaan uang mereka. Aturan mengenai pengeluaran juga mungkin relevan untuk aktivis, karena banyak negara mengatur partisipasi pihak ketiga yang independen dalam proses pemilihan. Selain meningkatkan transparansi sistem, tujuan pengungkapan ini seharusnya adalah untuk mendorong partisipasi kandidat yang memiliki sumber daya yang kurang atau sumber pendanaan yang tidak memadai. Oleh karena itu, aksesibilitas adalah masalah utama, dengan kebutuhan akan *factsheet* dan ringkasan yang dapat dipahami kandidat yang tidak memiliki pendidikan khusus, pelatihan atau nasihat hukum.

Komisi Pemilu Thailand memberikan informasi mendalam kepada partai-partai politik tentang cara mendaftar, termasuk sinopsis yang relevan mengenai kondisi dan aturan tentang ini, informasi tentang cara mendanai partai, dan aturan-aturan hukum yang mengatur semua ini. Komisi ini juga memberikan informasi mendalam mengenai 66 partai yang terdaftar, termasuk nama, alamat dan nomor kontak, serta jumlah anggota dan cabang.⁴⁵

Masyarakat juga harus diberi informasi tentang cara mengamati proses dan mendebat hasil-hasil tertentu, termasuk informasi undang-undang mengenai hak-hak yang diberikan kepada setiap warga negara dan informasi praktis tentang cara untuk mendaftar sebagai pengamat atau mengajukan mosi meragukan terkait suatu peristiwa, kebijakan atau hasil tertentu.

Sebaiknya situs pemilu juga menyertakan formulir-formulir relevan yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur-prosedur yang berhubungan dengan proses pemilu, seperti formulir prosedur untuk mengajukan pengungkapan keuangan, atau untuk mendaftar sebagai pengamat pemilu atau pengawas pemilu. Di negara-negara di mana proses nominasi untuk memberikan suara bagi kandidat dalam partai-partai politik juga dilakukan di bawah naungan komisi pemilu, informasi serupa mengenai partisipasi pada tahap itu juga harus disediakan. Peran pemilih dan statistik pendaftaran pemilih juga merupakan informasi yang sebaiknya disediakan.

45 Dapat dilihat di: <http://www.ect.go.th/english/political.html>.

2.2 Informasi Mengenai Partai dan Kandidat

Aspek penting lain mengenai peran pendorong komisi pemilu adalah untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang relevan mengenai pilihan para pemilih. Pada dasarnya, ini meliputi daftar kandidat dan partai yang bersaing untuk masing-masing posisi. Misalnya, situs komisi pemilu Peru berisi database semua partai politik yang terdaftar, termasuk nomor kontak dan nama-nama pemimpin.⁴⁶ Situs komisi pemilu Meksiko juga mencakup Rencana Tindakan untuk masing-masing pihak, serta pernyataan mereka mengenai prinsip dan dokumen, yang memungkinkan pemilih untuk menggunakan situs sebagai sumber informasi dasar mengenai perbedaan kebijakan antar partai.⁴⁷ Mengidentifikasi informasi, seperti lambang atau warna partai, juga berguna. Di negara-negara seperti India, dimana kesenjangan buta huruf berarti bahwa partai-partai juga melakukan kampanye dengan simbol identifikasi yang berbeda (seperti pemukul kriket-atau becak otomatis), daftar simbol yang digunakan oleh setiap partai juga berguna meskipun, mengingat kecilnya kemungkinan ada anggota masyarakat buta huruf yang melihat situs, informasi ini kemungkinan besar akan menjadi alat utama bagi para aktivis dan orang lain yang terlibat dalam proses kampanye.

Situs India juga memungkinkan pengguna untuk mengunduh salinan scan dari surat keterangan sumpah dengan tulisan tangan sumpah oleh semua kandidat sebagai bagian dari proses pendaftaran, meliputi pengungkapan keuangan dan pernyataan memenuhi persyaratan untuk menjabat. Fakta bahwa dokumen-dokumen ini tersedia berperan terhadap transparansi, kredibilitas dan kepercayaan pemilih terhadap proses, dan dapat membantu mendapatkan dukungan dari masyarakat luas dalam mengungkap ketidakteraturan, misalnya dalam hal pengungkapan aset. Komisi pemilu harus bercita-cita untuk menerapkan pendekatan semacam ini, di mana setiap dan semua informasi yang mereka miliki, secara standar, terbuka untuk umum.

Satu bidang di mana keterbukaan sangat penting adalah dalam penyediaan informasi keuangan mengenai berbagai kandidat dan partai. Untuk para kandidat, ini bisa dalam bentuk pengungkapan kekayaan pribadi atau surat pernyataan, informasi pajak, pengungkapan manfaat yang diterima dan informasi latar belakang lainnya. Informasi ini

46 Dapat dilihat di: <http://www.web.onpe.gob.pe/partidos-politicos.html>.

47 Dapat dilihat di: http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Directorio_y_documentos_basicos/.

mungkin berguna bagi masyarakat dalam berbagai cara. Seperti yang disebutkan di atas, informasi ini memungkinkan anggota masyarakat untuk mengidentifikasi penyimpangan dalam informasi yang akan sulit ditemukan oleh komisi pemilu. Informasi ini terutama bisa berguna jika dimanfaatkan dengan cara yang dapat membantu para pemilih untuk melacak potensi konflik kepentingan, seperti apakah seorang politisi atau kandidat yang mendukung subsidi untuk perusahaan pertambangan kebetulan memiliki investasi dalam industri pertambangan. Demikian pula, jenis-jenis pengungkapan ini dapat memberikan wawasan tentang apakah para politisi menyalahgunakan jabatan mereka, misalnya dengan menjual saham sebuah perusahaan yang mereka tahu akan dikenai denda besar oleh badan pengawas. Untuk partai politik, informasi keuangan umumnya lebih terfokus pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye.

Informasi ini sangat penting bagi integritas kampanye, dan mengingat bahwa komisi pemilu sering bertanggung jawab untuk memantau pengeluaran kampanye, wajar bahwa ini menjadi ajang pengujian yang dinamis bagi inisiatif pelaksanaan aturan akses data yang terbuka untuk umum. Misalnya, situs Pemilu Kanada memiliki database pencarian untuk semua biaya, kontribusi dan laporan keuangan dari setiap pemilu serta proses-proses nominasi partai. Yang menarik adalah bahwa pencarian nama donor dapat dilakukan lewat database, sehingga pengguna dapat melacak setiap kontribusi politik yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi tertentu.⁴⁸ Untuk Amerika Serikat, Kampanye Portal Pengungkapan Keuangan FEC adalah tambang emas informasi yang nyata, meliputi pengungkapan dana kampanye bulanan dari kandidat dan peta berkode warna untuk melihat pengeluaran berdasarkan wilayah dalam kampanye saat ini dan di masa lalu. Bahkan yang lebih mengesankan adalah disertakannya daftar terinci dari setiap pengeluaran kampanye yang dilaporkan. Pada bulan Agustus 2012, daftar yang dicantumkan adalah daftar terbaru dalam 10 hari terakhir. Daftar tersebut dapat diurutkan berdasarkan beberapa bidang yang berbeda, termasuk pengeluaran untuk kandidat yang tadinya akan didukung atau ditolak, dan sifat serta tujuan pengeluaran, yang memungkinkan pengguna untuk melihat, misalnya, daftar semua pengeluaran untuk televisi.⁴⁹

48 Dapat dilihat di: <http://www.elections.ca/scripts/webpep/fin/welcome.aspx?&lang=e>.

49 Dapat dilihat di: <http://www.fec.gov/pindex.shtml>.

Portal Pengungkapan Keuangan Kampanye Amerika Serikat adalah produk sebuah lembaga dengan anggaran dan tingkat keahlian teknis serta kecanggihan organisasi yang jauh di atas standar negara berkembang. Akan tetapi, komisi pemilu setiap negara harus memberikan akses terhadap informasi dasar tentang pembiayaan kampanye, bahkan jika presentasinya tidak mencolok atau tidak terlalu mudah dipahami oleh pengguna (*user-friendly*) seperti yang ada di Amerika Serikat. Informasi ini harus diperbarui dengan frekuensi yang dapat memungkinkan pemilih untuk memahami dampak pendanaan terhadap jalannya pemilu dan untuk mempertimbangkan hal ini saat menggunakan suara mereka.

Setiap negara mengatur penggalangan dana dan pengeluaran partai dan kandidat dengan cara yang berbeda. Beberapa negara, misalnya, membatasi sumbangan yang diberikan perorangan dan perusahaan kepada partai dan kandidat, sementara ada juga yang membatasi pengeluaran, yang menyertakan peraturan-peraturan khusus mengenai penempatan iklan di media. Aturan-aturan ini ditetapkan dan diterapkan dengan berbagai tingkat keketatan, termasuk frekuensi informasi yang diberikan oleh partai dan kandidat. Ini mempengaruhi kemampuan komisi pemilu untuk memberikan informasi keuangan kepada publik, karena mereka hanya bisa menyampaikan apa yang diberikan oleh partai dan kandidat kepada mereka.

Dalam banyak kasus, partai hanya diwajibkan untuk melaporkan informasi mengenai bidang keuangan yang telah diatur - baik untuk penggalangan dana maupun pengeluaran - sehingga hanya inilah yang dapat disampaikan oleh komisi kepada masyarakat luas.

Contoh yang baik dalam hal ini adalah Amerika Serikat yakni mengenai kekurangan informasi terkait pengeluaran dana untuk pemilu. Meskipun aturan-aturan ini cukup tepat dalam hal keterbukaan terkait dengan penggalangan dana oleh partai dan kandidat, ada celah besar bagi kelompok advokasi independen (dikenal sebagai *superpacs*), yang kebal dari kewajiban untuk melapor yang mengikat kandidat dan partai. Oleh sebab itu, walaupun situs Komisi Pemilihan Umum Federal (FEC) membanggakan *open data portal* yang canggih dan secara teknis mengesankan serta berisi informasi keuangan, portal ini hanya memberikan sebagian gambaran pengeluaran dana politik secara keseluruhan

karena banyak pengeluaran yang tidak dilacak.

2.3 *Informasi Hukum*

Bagian dari kebijakan keterbukaan yang kuat akan mencakup informasi mengenai kerangka hukum yang mengatur pemilu. Ini amat penting dalam demokrasi yang sedang berkembang untuk memastikan bahwa pemilih dapat sepenuhnya memahami mekanisme pemerintahan baru mereka.

Kerangka hukum ini bervariasi antar negara, tapi informasi hukum yang tersedia harus mencakup aturan-aturan hukum terkait pelaksanaan pemilu, termasuk membentuk dan mendaftarkan partai, aturan mengenai pemungutan suara dan cara terpilihnya kandidat serta partai, dan aturan yang memberikan mandat serta kekuasaan pada komisi pemilu. Di beberapa negara, komisi pemilu memiliki kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan tertentu - misalnya mengenai penempatan poster dan tanda-tanda atau alokasi iklan oleh media - dan aturan-aturan ini juga harus dipublikasikan.

Situs komisi pemilu Kamboja, Libya, Palestina dan Tunisia semuanya memberikan daftar menyeluruh dari semua hukum dan peraturan yang relevan. Situs Lybia, misalnya, meliputi kerangka konstitusional dan hukum dasar yang membentuk komisi pemilu dan badan pemerintahan nasional (Kongres), hukum yang membentuk konstituen, dan "hukum pemilu" khusus yang menetapkan aturan dasar untuk proses pemilu.⁵⁰ Situs Kamboja menyediakan daftar lengkap undang-undang, peraturan dan prosedur, arahan pemilu, termasuk yang diadopsi oleh komisi pemilu, prinsip-prinsip dan kode etik untuk berbagai pihak yang terlibat, termasuk petugas pemilu, partai dan kandidat, pengamat, serta angkatan bersenjata dan polisi.⁵¹ Situs komisi pemilu Sudan juga mencantumkan informasi serupa, yakni mencakup konstitusi sementara negara, serta teks dari *Comprehensive Peace Agreement Between the Government of Sudan and the Sudan People's Liberation Army*. Situs ini juga memiliki tautan (*link*) ke UU Pemilu, dan

50 Dapat dilihat di: <http://www.hnec.ly>, www.elections.ps dan <http://www.isie.tn> (semua dalam bahasa Arab).

51 Dapat dilihat di: http://www.necelect.org.kh/nec_english/.

berbagai *factsheet* mengenai berbagai hukum.⁵² Penyediaan *factsheet* atau ringkasan bersama hukum itu adalah praktek yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat, peneliti, akademisi dan aktivis, karena tidak semuanya akan memiliki keahlian hukum yang diperlukan untuk memahami dokumen-dokumen hukum primer.

Selain struktur dasar hukum, komisi pemilu harus memberikan salinan yurisprudensi atau keputusan yang relevan terkait dengan proses pemilu. Di sebagian besar negara, komisi pemilu memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan untuk menerapkan berbagai aturan hukum mengenai aneka isu penting, seperti pengeluaran kampanye, persyaratan partai atau kandidat, dan prosedur identifikasi pemilih. Keputusan mereka mengenai hal-hal tertentu bisa sangat penting, dan juga kontroversial. Misalnya, komisi pemilu mungkin akan memutuskan untuk mendiskualifikasi seorang kandidat populer dari pemilu karena melanggar aturan, atau apakah perlu dilakukan penghitungan ulang dalam sebuah pemilu yang hasilnya berbeda tipis. Mengingat dampak potensial dari keputusan-keputusan ini, sangatlah penting bahwa keputusan-keputusan ini ditampilkan sesegera mungkin setelah diadopsi.

Komisi pemilu Kosta Rika, sebuah badan kuasi-yudisial, memberikan contoh yang baik dalam hal ini. Situsnya memberikan daftar terkategori mengenai resolusi dan keputusan yang relevan, selain buku pedoman dan buku kerja yang menawarkan informasi hukum relevan yang lebih mudah dipahami pengguna (*user-friendly*).⁵³ Demikian pula, komisi pemilu Filipina, COMELEC, memberikan informasi yang sangat rinci mengenai resolusi dan keputusannya, termasuk untuk pemilu sebelumnya, dibagi berdasarkan pemilu dan jenis resolusi (misalnya, mengenai pendaftaran pemilih atau protes pemilu).⁵⁴

2.4 Informasi Mengenai Komisi Pemilu

Menyediakan setidaknya landasan minimal berisi informasi mengenai komisi pemilu dan

52 Dapat dilihat di: <http://nec.org.sd/new/new/english/index.php>. Situs ini tampaknya mengalami beberapa masalah teknis pada masa penelitian kami, karena berbagai tautan ini terkadang tersedia dan terkadang tidak tersedia dari waktu ke waktu.

53 Dapat dilihat di: http://www.tse.go.cr/normativa_jurisprudencia.htm.

54 Dapat dilihat di: http://www.comelec.gov.ph/?r=all_resolutions.

operasinya adalah cara yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh komisi pemilu. Walaupun penting bahwa badan-badan publik beroperasi secara transparan, lebih penting lagi bagi komisi pemilu, mengingat hubungan erat antara kredibilitas mereka, dan kepercayaan publik yang lebih luas mengenai hasil pemilu yang mereka awasi.

Informasi yang dibahas disini harus mencakup pernyataan yang jelas mengenai misi, mandat dan tujuan komisi pemilu. Situs komisi pemilu Ghana menyatakan bahwa mereka berjuang untuk menyelenggarakan "administrasi pemilihan umum yang benar-benar transparan, bebas dan adil." Situs tersebut menekankan independensi dan fungsi komisi, antara lain mengeluarkan kartu identitas bagi pemilih, mendidik penduduk Ghana, merancang dan melaksanakan program-program untuk memberi kebebasan kepada semua pemilih yang memenuhi syarat dan penyimpanan bahan pemilu yang aman.⁵⁵

Komisi pemilu juga harus memberikan informasi mengenai struktur dan organisasi mereka. Situs komisi pemilu India mencakup daftar nama, posisi dan tanggung jawab setiap anggota staf, serta nomor kontak setiap karyawan yang terlibat dalam menjawab permintaan informasi. Situs komisi pemilu Afrika Selatan bahkan melangkah lebih jauh, dengan menyediakan "organogram" yang berisi foto dan informasi mengenai kualifikasi dan tanggung jawab masing-masing staf senior.⁵⁶ Situs komisi pemilu Libya memberikan informasi pribadi lebih sedikit mengenai anggota staf individu, dan justru fokus pada struktur organisasi dan fungsi masing-masing posisi, informasi yang sangat penting bagi sebuah badan pemilu yang baru didirikan. Komisi Pemilu Thailand juga mencantumkan informasi yang mendalam mengenai sejarah mereka, komisioner saat ini dan sebelumnya, kekuasaan dan tugas mereka di tingkat nasional dan provinsi, struktur dan hukum yang menegakkannya.⁵⁷

Komisi pemilu Inggris melakukan pendekatan yang menarik, yakni menerbitkan standar

55 Dapat dilihat di: <http://www.ec.gov.gh>.

56 Dapat dilihat di: <http://www.elections.org.za/>.

57 Dapat dilihat di: <http://www.ect.go.th/english/about.html>.

kinerja secara online bagi para petugas pemilu.⁵⁸ Selain informasi staf dan struktural, komisi-komisi pemilu harus memupuk kepercayaan terhadap independensi mereka dengan menjelaskan proses penunjukan staf senior secara rinci. Situs Mahkamah Agung Pemilu Kosta Rika juga sangat bagus dalam hal ini, membahas secara rinci persyaratan kualifikasi dan proses pengangkatan, serta sifat dan asal-usul struktur badan secara lebih umum.⁵⁹ Situs Kosta Rika juga mencakup petunjuk dan nomor kontak staf dan departemen.

Seperti halnya dengan aspek transparansi pemerintah manapun, informasi keuangan sangatlah penting, termasuk juga batasan anggaran minimum dan standar gaji, beserta informasi mengenai pengeluaran. Komisi pemilu Kanada menerapkan hal ini dengan lebih baik, melalui sebuah situs yang mencakup pengungkapan keuangan yang rinci, hingga mencantumkan biaya spesifik untuk setiap makan siang bisnis yang dihadiri oleh Ketua Petugas Pemilu.

Transparansi dalam struktur pengambilan keputusan juga penting. Komisi pemilu Meksiko dan Albania terkenal dalam hal ini karena menayangkan pertemuan mereka secara langsung di internet.⁶⁰ Secara prinsipil, fakta bahwa pertemuan ini dapat dihadiri secara langsung oleh masyarakat umum adalah ide yang baik. Komisi pemilu juga harus memberikan informasi maksimal mengenai rapat mereka, termasuk perilsan informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, paling tidak setelah keputusan difinalisasi, sesuai dengan standar internasional mengenai hak atas informasi.

Komisi-komisi pemilu adalah otoritas publik dan, dengan demikian, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada individu sebagai tanggapan atas permintaan yang ada, sebagai bagian dari hak atas informasi. Sekitar 92 negara saat ini sudah memiliki undang-undang hak atas informasi,⁶¹ yang menetapkan secara rinci aturan-aturan hukum yang mengatur permintaan informasi, termasuk cara membuatnya dan cara pengolahan, informasi apa yang harus disediakan dan apa yang bisa ditahan (peraturan

58 Dapat dilihat di: www.electoralcommission.org.uk/home.

59 Dapat dilihat di: http://www.tse.go.cr/historia_tse.htm.

60 Dapat dilihat di: <http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2> and www.cec.org.al.

61 Lihat: <http://www.law-democracy.org/live/global-rti-rating/>.

mengenai hal-hal yang dapat dijadikan pengecualian), dan bagaimana mengatasi penolakan untuk memberikan informasi.

Komisi pemilu setidaknya harus memenuhi standar minimum yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi, karena transparansi adalah hal yang paling penting bagi sebuah badan, mereka harus berusaha untuk memenuhi standar praktek yang lebih baik di area ini. Ini termasuk memungkinkan pendaftaran/pencatatan permintaan secara elektronik, serta komitmen untuk memproses permintaan secepat mungkin, terutama selama periode pemilu, walaupun mungkin itu adalah saat di mana komisi pemilu paling sibuk. Bahkan di negara-negara yang tidak memiliki undang-undang hak atas informasi, komisi pemilu harus berusaha untuk memberikan tanggapan terhadap permintaan informasi seolah-olah mereka harus mematuhi kewajiban hukum di daerah ini. Situs komisi pemilu India sangat kuat dalam hal ini, yaitu menyediakan portal untuk membuat permintaan informasi secara online, serta statistik mengenai pengolahan permintaan (jumlah permintaan yang diterima dan ditolak, jumlah biaya yang dibebankan serta dibayar, dan seterusnya), jadwal tagihan, daftar kategori dokumen yang berada di bawah kendali mereka, dan keterangan rinci mengenai proses banding dan identitas petugas yang terlibat.

2.5 Pengungkapan Hasil yang Tepat Waktu

Sertifikasi hasil pemilu merupakan jantung mandat komisi pemilu. Sama pentingnya dengan aspek-aspek prosedural menjelang pemilu, pada akhirnya semuanya berujung pada momen penting di mana pemenang disebutkan dan partai yang kalah, dan para pendukung partai yang kalah harus menerima kekalahan. Dalam melaksanakan tugas ini dengan baik, komisi pemilu harus menyeimbangkan antara kebijakan dan kebutuhan mendasar akan akurasi. Hasil yang cepat membantu untuk meningkatkan kepercayaan terhadap proses, karena penundaan yang lama dan ketidakpastian berkepanjangan yang menyertai hal ini dapat memunculkan kecurigaan bahwa hasil pemilu dimanipulasi. Di sisi lain, komisi pemilu harus dengan segala cara menghindari akibat negatif dari menyebutkan kandidat tertentu sebagai pemenang sebelum penghitungan suara berakhir. Tidak ada yang akan mengikis kepercayaan terhadap sebuah sistem lebih cepat daripada merilis hasil yang bertolak belakang. Ini, melebihi apapun, akan dipandang sebagai kegagalan komisi pemilu dalam memenuhi peran intinya.

Dalam prakteknya, seberapapun efisien komisi pemilu dalam memilih persaingan pemilu, mereka tidak akan mampu bersaing dengan media, yang tidak terlalu menghindari resiko dan bersedia untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian walaupun ini mungkin terbukti salah. Ini bisa menjadi penyeimbang yang baik agar komisi pemilu lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan dini, walaupun bukan tanpa bahaya. Contoh yang baik tentang ini adalah pemilu presiden Gore-Bush tahun 2000 di Amerika Serikat, yang bergantung pada hasil pemungutan suara di Florida. Gore awalnya mengakui negara bagian tersebut, dan begitu juga dengan pemilu, berdasarkan laporan media, tapi kemudian menarik persetujuannya keesokan harinya, saat hasilnya tampak kurang jelas. Berbagai tekanan yang diberikan pada media - khususnya dalam kompetisi bagi penonton dan oleh sebab itu berita utama - dapat mengarah pada prediksi tidak sehat saat hasilnya berbeda sedikit sekali dan hasil akhir sulit dicapai. Oleh karena itu, penting sekali untuk menekankan peran komisi pemilu dalam membuat keputusan akhir mengenai pemilu (tunduk, tentu saja, pada pengajuan banding di pengadilan). Bersamaan dengan pengumuman hasil yang dikeluarkannya, komisi pemilu harus senantiasa menginformasi media mengenai bahayanya menarik kesimpulan sebelum waktunya, dan meminta mereka untuk berhati-hati sebelum mengumumkan pemenang.

Secara praktis, sulit untuk menentukan suatu standar "praktek yang lebih baik" yang berlaku secara universal. Tentu saja, proses sertifikasi hasil pemilu nasional di India atau Indonesia akan jauh lebih rumit, sulit dan memakan waktu daripada melakukan tabulasi untuk hasil pemilu sebuah negara kecil seperti Luxembourg. Akan tetapi, dalam hal prinsip-prinsip dasar, *Code of Good Practice in Electoral Matters* milik Dewan Eropa menawarkan panduan yang baik:

3.2.2.5

Transfer hasil: Ada dua jenis hasil: hasil sementara dan hasil akhir (sebelum semua kesempatan untuk naik banding telah digunakan). Media, dan juga seluruh negara, selalu tidak sabar untuk mengetahui hasil awal sementara. Kecepatan disampaikannya hasil-hasil ini bergantung pada sistem komunikasi negara tersebut. Hasil dari tempat pemungutan suara (TPS) dapat disampaikan ke daerah pemilu (misalnya) oleh petugas pengawas TPS, didampingi dua anggota lain dari

staf TPS yang mewakili pihak lawan, dalam beberapa kasus di bawah pengawasan aparat keamanan, yang akan mencatat proses, kotak suara, dll.

Betapapun banyaknya pelayanan yang telah dilakukan pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara, transmisi hasil adalah operasi penting yang tingkat kepentingannya sering diabaikan, oleh sebab itu proses ini harus dilakukan secara terbuka. Transmisi dari daerah pemilihan kepada pemerintah daerah dan Komisi Pemilu Pusat - atau otoritas tinggi yang kompeten - dapat dilakukan melalui fax. Dalam hal ini, catatan-catatan akan dipindai dan hasilnya dapat ditampilkan saat telah diterima, televisi dapat digunakan untuk menyiarkan hasil-hasil ini tapi sekali lagi transparansi yang terlalu banyak bisa menjadi hal yang berbahaya jika masyarakat tidak siap dengan jenis pelaporan bertahap seperti ini. Faktanya adalah bahwa hasil awal biasanya berasal dari perkotaan, yang biasanya tidak pernah atau tidak selalu melakukan pemungutan suara dengan cara yang sama seperti daerah pedesaan. Oleh karena itu penting untuk menjelaskan kepada publik bahwa hasil akhir mungkin akan sangat berbeda, atau bahkan berlawanan dengan, hasil sementara, tanpa ada pertanyaan mengenai terjadinya kecurangan.⁶²

Di sebagian besar negara, suara dihitung di masing-masing TPS (jumlah TPS banyak) dan hasilnya kemudian disampaikan ke bagian regional atau pusat melalui telepon atau faks (diikuti, nantinya, oleh surat suara yang sesungguhnya). Praktek yang lebih baik adalah adalah komisi pemilu merilis hasil saat masuk, untuk setiap TPS, dan hanya menambahkan jumlah total seiring dengan bertambahnya laporan dari TPS. Akan tetapi, ini bisa menyesatkan di bagian awal proses, karena hasil dari beberapa TPS pertama, karena berbagai alasan, bisa jadi tidak memberikan gambaran yang akurat mengenai kekuatan keseluruhan sebuah partai atau kandidat. Misalnya, sebuah distrik pemilu mungkin meliputi daerah pedesaan dan perkotaan, dengan kecenderungan politik yang berbeda, dan kecepatan pelaporan yang berbeda. Pada bagian awal proses, ini bisa memberikan kesan bahwa kandidat atau partai yang disukai oleh daerah dengan pelaporan yang cepat lebih banyak mendapatkan suara dibandingkan kenyataannya.⁶³

⁶² *Supra*. note 35.

⁶³ Di negara-negara maju, TPS di daerah pedesaan seringkali lebih kecil dan oleh karena itu penghitungan suaranya lebih cepat dan proses pelaporannya lebih cepat daripada TPS di daerah perkotaan, sementara di

Untuk mengatasi hal ini, komisi pemilu harus memberikan informasi mengenai hal ini sebagai bagian dari hasil yang dilaporkan untuk memastikan adanya kejelasan informasi mengenai keadaan yang sesungguhnya terjadi. Ini harus, misalnya, meliputi informasi mengenai berapa banyak TPS yang telah melapor dan berapa banyak yang belum. Komisi Pemilu Australia juga memberikan data tren berdasarkan pemilu sebelumnya, untuk menunjukkan pada pemilih apakah ada perubahan posisi perolehan suara. Dalam sistem penghitungan suara yang lebih kompleks, seperti sistem pemungutan suara preferensial, di mana suara dari kandidat yang paling tidak populer didistribusi ulang sampai ada kandidat yang menjadi pemenang, mungkin diperlukan informasi lebih lanjut untuk membantu meminimalkan risiko hasil parsial salah dimengerti.

Bagi kebanyakan orang, dalam proses ini media bertindak sebagai penghubung dengan komisi pemilu. Komisi pemilu harus mencantumkan hasil yang masuk di internet, agar dapat diakses oleh siapapun. Akan tetapi, media, dan terutama televisi, telah mengembangkan pendekatan pelaporan yang sangat canggih - misalnya melibatkan grafik, rumus yang prediktif dan pendapat para ahli - sehingga sebagian besar warga yang memiliki televisi dan akses ke internet akan lebih memilih untuk menerima hasil melalui media televisi yang lebih menghibur dan informatif. Pelaporan media yang baik juga akan menjelaskan kebiasaan yang tampak jelas dalam data yang masuk

Teknologi berdampak pada masalah ini, mereka yang terlibat dalam penghitungan suara di TPS seringkali diawasi melalui jendela oleh para pengamat eksternal, atau menyampaikan hasil pengamat resmi kepada teman dan kolega di luar. Para pengamat eksternal ini kemudian dapat menyampaikan hasil tersebut melalui telepon seluler kepada masyarakat luas. Meskipun hal ini dapat melemahkan proses formal tabulasi suara, pada saat yang sama kegiatan ini juga menghasilkan proses yang sangat terbuka, sesuatu yang akan lebih dipercayai oleh pemilih yang curiga.

2.6 Informasi Mengenai Pemilu Sebelumnya

Setelah demokrasi berakar di suatu negara, demokrasi cenderung bergerak maju dengan

negara-negara yang kurang maju, seringkali TPS di daerah pedesaan membutuhkan lebih banyak waktu untuk melapor.

momentumnya sendiri. Dengan semakin banyaknya pemilu yang berhasil, warga semakin terbiasa untuk mempergunakan hak partisipasi mereka, hal ini semakin menanamkan proses demokrasi ke dalam kesadaran kolektif. Oleh karena itu, informasi mengenai sejarah pemilu sebelumnya sangatlah penting dalam sistem pemilu. Data yang terbuka mengenai pemilu-pemilu sebelumnya memungkinkan warga untuk menempatkan situasi politik yang mereka hadapi saat ini ke dalam konteks yang tepat. Data mengenai pemilu sebelumnya juga, tentu saja, menarik bagi para aktivis, peneliti dan kandidat.

Seperti biasa, semakin banyak informasi semakin baik. Walaupun pemilu terakhir mungkin akan menjadi hal yang paling menarik minat sebagian besar pengguna situs, ada gunanya untuk menyediakan data pemilu-pemilu jauh sebelumnya. Situs komisi pemilu India mencantumkan hasil, statistik dan analisis mulai dari pemilu pertama India pada tahun 1951. Komisi pemilu Kanada memberikan hasil mulai saat negara tersebut memiliki status Dominion, pada tahun 1867, sementara Selandia Baru menyediakan hasil hingga lebih jauh ke belakang yakni, tahun 1853.⁶⁴

Pengungkapan mengenai pemilu sebelumnya jelas dimulai dari hasil, termasuk suara yang diberikan untuk masing-masing kandidat dan partai, jumlah total suara yang diberikan, jumlah kertas suara yang cacat, jumlah suara yang tidak sah dan partisipasi pemilih. Idealnya, informasi ini harus mencakup data mentah bagi para peneliti serta menyertakan presentasi yang dapat lebih diakses dan dirancang untuk dapat dimengerti oleh orang awam. Peta dengan kode warna yang menunjukkan hasil di berbagai daerah adalah cara yang sangat efektif untuk menyajikan informasi ini. Beberapa situs komisi pemilu sangat berhasil dalam menampilkan informasi dengan cara ini, antara lain Afrika Selatan, Mesir, Kanada dan Yunani.

Sumber sekunder mengenai pemilu itu sendiri juga berguna. Yang paling berguna adalah laporan dari pemantau pemilu, untuk memberikan perhitungan independen mengenai adil tidaknya sebuah pemilu bagi para pengguna. Di Kanada, laporan dari Kepala Petugas Pemilu disertakan pada situs, sementara situs komisi pemilu Inggris mencantumkan tautan ke publikasi dari sumber-sumber akademis mengenai pemilu.

64 Dapat dilihat di: <http://www.elections.org.nz>.

2.7 Informasi yang Dapat Diakses dan Mudah Dipahami Pengguna

Aksesibilitas merupakan prinsip dasar dari kebijakan keterbukaan yang efektif dan harus menjadi dasar semuanya. Aspek ini sudah dibahas dalam bagian-bagian sebelumnya. Misalnya, menyediakan "*factsheet*" ringkasan struktur hukum dimana komisi pemilu beroperasi sesuai dengan undang-undang yang relevan secara keseluruhan adalah salah satu cara untuk membantu memastikan bahwa informasi yang disebar oleh komisi pemilu tersedia dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh warga umum.

Pertimbangan penting lain dalam menjamin aksesibilitas adalah bahasa yang digunakan dalam informasi yang dirilis. Menurut *Code of Good Practice in Electoral Matters* keluaran Dewan Eropa, informasi "juga harus tersedia dalam bahasa minoritas nasional, paling tidak di tempat para minoritas berjumlah sebesar persentase tertentu dari populasi."⁶⁵ Tentu saja, penerapan hal ini bergantung pada konteks nasional dan regional. Panduan informasi standar pemilih Kanada tersedia dalam 27 bahasa yang berbeda. Walaupun ini merupakan komitmen yang mengesankan, jumlah bahasa yang tersedia bukanlah satu-satunya pertimbangan. Negara juga harus berhati-hati untuk memprioritaskan terjemahan informasi ke dalam bahasa yang digunakan oleh pemilih minoritas yang jumlahnya signifikan, terutama di tempat dimana masyarakat cenderung tidak memahami bahasa mayoritas.

Meskipun pembuatan panduan informasi pemilih dalam berbagai bahasa merupakan langkah positif, pelaksanaan yang lebih baik adalah dengan memiliki versi multibahasa website komisi pemilihan secara keseluruhan. Misalnya, situs Komisi Bantuan Pemilu Amerika Serikat tersedia dalam bahasa Inggris, Cina, Jepang, Korea, Spanyol, Tagalog dan Vietnam.⁶⁶ Sebaliknya, situs komisi pemilu Peru hanya mencantumkan sumber-sumber berbahasa Spanyol, meskipun negara ini memiliki populasi yang signifikan dari etnis berbahasa Quechua dan Aymara.⁶⁷ Dalam mode analog, situs komisi pemilu harus,

65 Council of Europe, Doc. 9624 (2002). Dapat dilihat di:

<http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc02/EDOC9624.htm>.

66 Dapat dilihat di: <http://www.eac.gov/>. Perhatikan bahwa ini adalah entitas hukum yang berbeda dari komisi pemilu utama, FEC. Mandat badan ini diarahkan terhadap penjangkauan pemilih. Situs utama FEC hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

67 Dapat dilihat di: <http://www.onpe.gob.pe/inicio.php>.

sebisa mungkin, dirancang untuk mengakomodasi pengguna yang memiliki gangguan penglihatan.

Selain aksesibilitas dasar, kemudahan untuk dipahami pengguna juga penting, terutama di situs yang mempublikasikan data dalam jumlah besar. Skema publikasi proaktif paling ambisius di dunia pun hanya akan sedikit manfaatnya jika situs yang menampilkan informasi tersebut begitu berbelit-belit dan membuat pengguna nyaris mustahil menemukan informasi yang dicari dalam jangka waktu yang wajar. Situs yang baik harus memiliki fungsi pencarian yang efektif, dan juga harus memiliki subkategori dan dipetakan untuk mendorong kemudahan penggunaan.

Situs komisi pemilu Inggris menyediakan subkategori spesifik bagi administrator pemilu, kandidat / agen, partai / kampanye, polisi / kejaksaan, wartawan dan pemilih, serta memungkinkan pengguna untuk menentukan secara spesifik Inggris wilayah mana yang menjadi ketertarikan mereka. Situs komisi pemilu Kanada memiliki spanduk dengan tautan dimana pengguna dapat mengidentifikasi diri mereka sebagai pemilih, partai politik, kandidat, asosiasi daerah pemilu, kontestan kepemimpinan partai, kontestan nominasi, pihak ketiga, peneliti, jurnalis, guru, siswa atau petugas yang bertugas kembali (*returning officer*).

Meskipun kategorisasi dan sub-kategorisasi dapat menjadi alat navigasi yang berguna, pendekatan ini bisa menjadi kontraproduktif jika pengguna merasa bahwa sistem ini tidak intuitif. Komisi pemilu India menghindari masalah ini dengan membuat hampir setiap bagian dari situs dapat diakses melalui *sidebar* pada halaman utama. Beberapa subkategori yang ada ditampilkan di *sidebar* ketika pengguna meletakkan mouse di atasnya, pengunjung dimungkinkan untuk mengakses hampir setiap halaman di situs dengan satu klik.

Walaupun masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dalam hal kegunaan, komisi pemilu tidak harus memilih salah satu di antaranya. Sebuah alternatif sederhana untuk membuat setiap halaman dapat diakses dari halaman utama ini adalah dengan menyediakan tautan utama untuk menuju peta situs: daftar satu halaman yang terstruktur

mengenai segala sesuatu yang ada di situs, memungkinkan pengguna untuk menavigasi peta situs jika mereka tidak dapat menemukan item tertentu yang mereka cari melalui struktur navigasi situs. Situs Filipina sangat mudah dipahami oleh pengguna, karena menggunakan bar di bagian atas yang berisi kategori-kategori utama dan menu yang dapat diturunkan (*dropdown*) dan tombol peta situs. Situs ini juga memiliki halaman khusus dengan fitur aksesibilitas, yang memungkinkan pengguna untuk mengubah cara munculnya halaman tersebut, tombol yang dapat diklik untuk memperbesar atau memperkecil ukuran tulisan, dan berbagai tombol 'pindah ke' untuk pindah ke tujuan-tujuan umum.⁶⁸

Kecenderungan cara pengguna mengakses situs juga harus diperhitungkan, karena ada perbedaan-perbedaan signifikan dalam penampilan dan kegunaan situs saat dibuka dari komputer atau dari telepon seluler. Mengingat bahwa di beberapa negara, terutama di Afrika, sebagian besar pengguna mengakses internet melalui telepon genggam mereka, perbedaan ini harus dipertimbangkan saat merancang sebuah situs. Salah satu solusinya adalah dengan merancang dua situs, satu disesuaikan secara spesifik bagi para pengunjung dari telepon genggam, dan secara otomatis mengarahkan pengguna sesuai mode pengaksesan mereka. Akan tetapi, mengingat sumber daya tambahan yang diperlukan, pilihan sederhana, terbaik kedua yang memang sebaiknya diterapkan adalah dengan merancang sebuah situs yang kompatibel dengan kedua sistem. Ini berarti menghindari penggunaan font tulisan yang kecil dan memastikan bahwa setiap tautan memiliki spasi yang memadai, daripada menumpuk semuanya menjadi satu. Dari perspektif ini, daftar navigasi panjang pada halaman utama situs komisi pemilu India bermasalah, karena tautan yang ada nyaris mustahil untuk diklik dari telepon genggam.

Mengingat pentingnya peranan situs dalam penyebarluasan informasi terkait pemilu, komisi pemilu harus berhati-hati untuk memastikan bahwa situs mereka terpelihara dengan baik dan aman. Beberapa situs komisi pemilu yang dikunjungi selama penelitian ini - seperti situs Sudan dan Afrika Selatan - berisi tautan yang mati atau kadaluarsa. Yang lebih merisaukan, situs komisi pemilu Thailand mencantumkan beberapa tautan yang terdaftar sebagai situs bermasalah menurut Google.⁶⁹ Meski situs manapun dapat

68 Lihat <http://www.comelec.gov.ph>.

69 Dapat dilihat di: <http://www.ect.go.th/english>.

menjadi korban serangan cyber, penting bagi situs komisi pemilu untuk memiliki komitmen yang lebih tinggi dalam bidang keamanan dan, jika ditemukan pelanggaran, harus segera diambil langkah-langkah tertentu untuk memperbaiki masalah tersebut.

Meskipun laporan ini umumnya berfokus pada situs sebagai mekanisme penyebaran informasi, penting agar komisi pemilu juga mempertahankan program informasi non-internet (*offline*) yang kuat, khususnya di negara-negara dimana penggunaan internet masih rendah. Mekanisme penyebaran utama di sebagian besar negara adalah melalui media, yang umumnya memiliki jangkauan yang luas kepada publik. Walaupun pemasangan iklan di media membutuhkan banyak biaya dari komisi pemilu, media memiliki kewajiban profesional untuk bekerja secara paralel dengan komisi pemilu dalam mensosialisasikan aneka kategori informasi yang diuraikan dalam laporan ini, terutama informasi mengenai cara berpartisipasi dalam pemilu, informasi mengenai partai dan kandidat, dan informasi mengenai hasil pemilu. Lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab khusus untuk melakukan hal ini, baik disebutkan secara eksplisit dalam mandat mereka atau dalam aturan hukum lainnya, atau hanya bagian dari kewajiban umum mereka sebagai penyedia laporan demi kepentingan umum. Di banyak negara, lembaga penyiaran swasta juga memiliki kewajiban hukum untuk memberikan jenis informasi tertentu terkait pemilu, misalnya dengan menyediakan akses ke partai dan kandidat sehingga mereka dapat menyebarkan pesan-pesan pemilu mereka.

Beberapa sistem lain untuk menyebarkan informasi, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok yang rentan, tersedia, walaupun sebagian besar melibatkan biaya terukur (yaitu biaya yang bertambah berdasarkan skala penyebaran informasi). Banyak yang telah disebutkan di bagian lain dalam laporan ini. Ini meliputi papan reklame, brosur, *factsheet*, pertemuan balai kota, sesi informasi, pelatihan untuk pelatih, pesan SMS dan berbagai macam alat-alat lain (contohnya kaos dan stiker).

Dalam banyak kasus, komisi pemilu dapat secara signifikan meningkatkan pengaruh mereka melalui kerja sama dengan aktor-aktor lain. Kelompok masyarakat sipil seringkali dapat menarik dana dari donatur untuk upaya penjangkauan, dan banyak komisi pemilu berkolaborasi dengan mereka dalam upaya pendidikan pemilih. Pengaruh

dari peningkatan kesadaran dapat dilipatgandakan melalui kerja sama dengan badan-badan publik lainnya, seperti sekolah atau pusat-pusat penyediaan layanan kesehatan (seperti rumah sakit dan klinik), dan menggunakan tempat pertemuan sosial lainnya, seperti pusat berkumpul masyarakat, alun-alun, dan bahkan tempat-tempat peribadatan

2.8 Umpan Balik Pengguna dan Mekanisme Pelaporan

Keterbukaan yang efektif bersifat dua arah. Meskipun arus utama informasi adalah dari komisi pemilu kepada publik, penting bahwa komisi pemilu menyediakan mekanisme untuk menerima umpan balik dari pengguna. Beberapa negara demokrasi yang sedang berkembang berada di garis depan pengembangan kapasitas ini. Misalnya, situs Libya menyediakan fungsi yang bersumber pada masyarakat (*crowd-sourcing*) untuk melaporkan pelanggaran aturan pemilu. Ini dilakukan melalui peta interaktif dengan fungsi pelabelan geografis (*geo-tagging*), yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan perilaku ilegal secara langsung, kapanpun dan dimanapun mereka melihatnya. Komisi juga menyediakan nomor yang tidak dikenai biaya pemanggilan untuk melaporkan pelanggaran.⁷⁰ Situs Mesir, meskipun tidak terlalu canggih secara teknis, juga memungkinkan pengguna untuk melaporkan pelanggaran secara online.⁷¹ Selain pilihan pelaporan umum, saat suatu negara sedang menghadapi skandal tertentu mungkin akan berguna untuk menghubungi nomor tersebut demi mendapatkan umpan balik yang tepat sasaran mengenai masalah yang sedang dihadapi. Dalam menanggapi laporan yang tersebar luas mengenai telepon penipuan yang mengarahkan pemilih ke TPS yang sesungguhnya tidak ada pada pemilu presiden 2011, situs komisi pemilu Kanada menyediakan halaman khusus untuk melaporkan kasus-kasus seperti itu.

Selain melaporkan penipuan terhadap pemilih, situs yang lebih baik harus menetapkan diri sebagai pusat penerimaan umpan balik masyarakat dan pembahasan isu-isu pemilu. Komisi pemilu India memiliki "*Citizens' Corner*" di mana umpan balik dari pemilih dicatat.⁷²

⁷⁰ Dapat dilihat di: <http://www.hnec.ly/observe/> (dalam bahasa Arab).

⁷¹ Dapat dilihat di: <http://www.elections.eg/> (dalam bahasa Arab).

⁷² Dapat dilihat di: http://eci.nic.in/eci_main1/index.aspx.

Standar Kinerja yang Lebih Baik

Bagian laporan ini memberikan sejumlah rekomendasi agar kinerja komisi pemilu dapat menjadi lebih baik. Fokusnya adalah pada penyediaan informasi, khususnya melalui website, tetapi juga menyertakan beberapa rekomendasi struktural umum mengenai komisi pemilu. Kemampuan komisi pemilu untuk menyebarkan informasi secara efektif jelas terkait erat dengan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Pada saat yang sama, mengingat dekatnya hubungan antara pemilu dengan demokrasi, negara wajib menyediakan sumber daya yang diperlukan komisi pemilu untuk menjalankan fungsi mereka dengan baik. Karena penyediaan informasi yang efektif sangatlah penting bagi pemilu yang murni, penyediaan informasi harus mencakup sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi standar pengungkapan informasi minimum. Selain dana yang diberikan langsung kepada komisi pemilu, ini bisa mencakup langkah-langkah pengaturan yang menuntut aktor-aktor lain - seperti layanan publik dan lembaga penyiaran lainnya - untuk membantu dalam penyediaan informasi atau bekerja sama dengan komisi pemilu. Bahkan negara-negara yang sangat miskin atau kecil seharusnya mampu memenuhi standar minimum mengenai penyediaan informasi pemilu, bilamana perlu dengan dukungan dari masyarakat internasional.

1. Komisi Pemilu

- Komisi pemilu harus terstruktur sehingga memiliki perlindungan yang efektif terhadap pengaruh partai politik yang berkuasa, dan dari kepentingan politik serta pribadi pihak-pihak lainnya, termasuk terkait cara para anggota diangkat dan pengalokasian dana.
- Komisi pemilu harus diberi dana yang cukup untuk memungkinkan mereka melaksanakan fungsinya dengan baik dan dengan cara yang memunculkan rasa percaya dari para pemilih.
- Komisi pemilu harus merupakan badan yang permanen, meskipun mereka dapat menambah sumber daya manusia mereka selama periode pemilu yang sesungguhnya.

2. Prinsip Umum Mengenai Transparansi

- Komisi pemilu harus mengakui bahwa transparansi dan penyediaan informasi secara luas yang berkaitan dengan pemilu adalah prioritas utama pekerjaan mereka, serta mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai untuk memenuhi fungsi ini.

3. Mendorong Partisipasi

- Tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilih yang memenuhi persyaratan memahami cara untuk mendaftar dan memberikan suara mereka, dan makna aktivitas ini, merupakan tanggung jawab komisi pemilu, yang harus memberikan informasi yang diperlukan untuk tujuan ini.
- Untuk memenuhi hal-hal di atas, komisi pemilu harus menggunakan beragam sistem penyebaran informasi, termasuk melalui situs dan melalui setiap pertemuan tatap muka yang mungkin dilakukan, dan harus bekerja sama dengan badan-badan lain untuk mencapai hasil maksimum dan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal.
- Komisi pemilu harus memastikan bahwa jenis informasi berikut disediakan bagi para pemilih:
 - ❖ cara dan waktu untuk mendaftar, termasuk dokumen yang diperlukan;
 - ❖ cara memberikan suara dan tanggal pemilu, dari jauh-jauh hari;
 - ❖ cara memberikan suara jika seorang pemilih sedang tidak berada di tempat pada hari pemilu atau, apabila relevan, warga negara yang tinggal di luar negeri;
 - ❖ cara memberikan suara elektronik (*e-vote*), saat relevan; dan
 - ❖ pentingnya dan signifikansi pemungutan suara, dan cara suara individu ditabulasikan dan dihitung untuk menentukan keberhasilan pemilu tertentu (seperti melalui perwakilan proporsional atau sistem jajak pendapat calon tertinggi (*first-past-the-post system*)).
- Komisi pemilu harus memastikan bahwa informasi yang relevan

disediakan untuk memungkinkan aktor-aktor lain berpartisipasi dalam pemilu (seperti: untuk warga, cara mendaftar sebagai pengamat atau mengajukan keluhan; untuk partai dan kandidat, cara mendaftar dan mengenai aturan keuangan dan aturan utama lainnya; dan untuk donor, aturan mengenai kontribusi).

4. Memungkinkan Pilihan Berdasarkan Informasi yang Cukup

- Komisi pemilu harus menyebarluaskan informasi mengenai partai dan kandidat yang bersaing dalam pemilu. Dalam hal ini minimal harus mencakup daftar partai dan kandidat yang terdaftar, dan informasi mengenai landasan dan janji-janji, serta keuangan mereka.
- Komisi pemilu harus mempublikasikan jenis informasi keuangan utama yang diungkapkan oleh partai dan kandidat kepada mereka, termasuk, jika tersedia, deklarasi aset dan deklarasi persyaratan untuk kandidat perorangan, dan informasi mengenai penggalangan dana dan pengeluaran untuk para partai. Informasi ini harus sebisa mungkin disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami pengguna, dengan format data yang terbuka yang memungkinkan untuk penyortiran luas dan pencarian, dan diperbarui sesering mungkin.

5. Memahami Aturan

- Kerangka hukum utama yang mengatur pemilu - termasuk ketentuan-ketentuan konstitusional yang relevan, undang-undang dasar, peraturan dan aturan yang diadopsi oleh badan pengawas - harus diterbitkan oleh komisi pemilu.
- Komisi pemilu juga harus membuat keputusan sendiri terkait dengan pemilu, serta yurisprudensi pengadilan yang relevan, sesegera mungkin setelah keputusan-keputusan ini diadopsi.

6. Membuka Komisi Pemilu

- Komisi pemilu harus mempublikasikan berbagai informasi mengenai

struktur dan operasi mereka, termasuk misi, mandat, tujuan, organigram, informasi mengenai staf, dan informasi keuangan, termasuk anggaran dan pelaporan pengeluaran mereka.

- Komisi pemilu harus membuka pertemuan mereka kepada publik, kecuali kerahasiaan diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan utama.
- Komisi pemilu adalah badan-badan publik dan harus menghormati hak atas informasi, termasuk dengan cara menyediakan sistem-sistem untuk menerima dan membuat keputusan terkait permintaan akan informasi. Mengingat pentingnya transparansi bagi komisi pemilihan umum, mereka harus berusaha untuk meningkatkan kinerja standar internasional dalam hal ini ini, melampaui standar nasional minimal sebagaimana diperlukan.

7. Mengumumkan Hasil

- Jika relevan komisi pemilu harus menegaskan posisi mereka sebagai badan yang membuat pengumuman-pengumuman resmi mengenai hasil pemilu, dan mereka harus melaksanakan tugas mereka sebisa mungkin dengan tepat waktu dan lengkap, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu yang sesungguhnya.

8. Menyediakan Landasan Sejarah

- Komisi pemilu harus memberikan informasi mengenai hasil-hasil pemilu sebelumnya (suara yang diberikan oleh kandidat / yurisdiksi, pemenang dan pihak yang kalah, tingkat partisipasi, dan sebagainya), serta informasi lain, seperti laporan dari pemantau pemilu yang terdaftar.

9. Memastikan Aksesibilitas

- Komisi Pemilu harus memastikan bahwa situs mereka mudah dinavigasi (dengan fungsi pencarian yang baik, kategorisasi dan peta situs), minimal dengan menyediakan informasi utama dalam semua bahasa utama yang digunakan oleh para pemilih, disajikan sebisa

mungkin dengan cara yang dapat dipahami oleh warga umum, dan, bila relevan, dapat diakses melalui telepon genggam serta komputer.

10. Menyediakan Siklus Umpan Balik

- Komisi pemilu harus menyediakan sistem dimana seseorang dapat menyampaikan pengaduan dan memberikan umpan balik kepada mereka, dan memberikan publisitas yang tepat untuk sistem-sistem ini.